

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia mempunyai arti penting dalam konteks regional dan global. Sebagai negara-negara yang terletak di kawasan Asia-Pasifik, keduanya mempunyai peran sentral dalam menentukan dinamika keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut. Keduanya juga mempunyai pengaruh yang kuat dalam forum-forum regional seperti ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*), serta dalam kerja sama lintas batas untuk menyelesaikan masalah-masalah regional dan global seperti perubahan iklim, keamanan, dan perdagangan internasional.

Australia dan Indonesia yang bertetangga dekat mengalami perubahan yang mendasar dan kedua negara menyadari hal ini. Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mulai menjabat sejak tahun 2014 dan memberikan dorongan kepada rakyatnya untuk selalu berupaya dengan lebih giat, dengan slogan yang menjadi viral, yaitu ‘bekerja, bekerja, dan bekerja’ untuk meraih kesempatan bersejarah bagi Indonesia untuk menjadi negara besar di panggung dunia. Australia juga memahami bahwa mereka harus bertransformasi untuk menghadapi abad Asia. Hal ini terlihat jelas dari serangkaian rencana strategis yang telah dihasilkan Australia selama satu dekade terakhir melalui tiga buku putih yakni “*Three Defence White Papers*” (sejak 2009), *The Asian Century White Paper* (2013), dan “*A Foreign Policy White Paper And A Thorough-Going Intelligence Review*” (2017).¹ Bahwa hubungan Australia-Indonesia akan berubah karena kedua negara percaya bahwa transformasi regional akan segera terjadi

¹ Lindsey, Tim, and Dave McRae, eds. *Strangers next door?: Indonesia and Australia in the Asian Century*. Bloomsbury Publishing, 2018.

Pada 24 Agustus 2018, Pemerintahan Scott Morrison memasuki jabatan Perdana Menteri Australia setelah menggantikan Malcolm Turnbull dan memimpin Partai Liberal Australia. Fokus utama kebijakan luar negeri Morrison terpusat pada penguatan hubungan dengan sekutu utama, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Asia Pasifik. Keamanan regional, terutama di kawasan Asia Pasifik, menjadi prioritas utama, dengan Morrison mendukung kerja sama keamanan dan pertahanan dengan negara-negara tetangga. Pemerintahan Morrison juga menunjukkan sikap tegas terhadap pengaruh dan aktivitas China, terutama dalam konteks keamanan dan ekonomi. Morrison, sebagai anggota Partai Liberal Australia yang cenderung menganut ideologi konservatif dan ekonomi pasar bebas, mewakili kebijakan ekonomi liberal. Pihaknya mendukung pengurangan pajak, deregulasi, dan mendorong investasi swasta. Manajemen krisis menjadi sorotan khusus dalam pemerintahan Morrison, khususnya dalam menghadapi kebakaran hutan besar-besaran dan pandemi COVID-19.

Sementara itu, pada sisi oposisi, Anthony Albanese memimpin Partai Buruh Australia dan menjadi pemimpin oposisi sejak 2019. Anthony Albanese resmi dilantik sebagai pemimpin Australia pada 23 Mei 2022, setelah berhasil mengalahkan pemerintahan konservatif di bawah kepemimpinan Scott Morrison dalam pemilihan umum., pandangan kebijakan luar negeri Albanese menekankan kerja sama multilateral dan peran Australia dalam organisasi internasional seperti PBB dan G20. Albanese juga menempatkan fokus pada hubungan dengan negara-negara di Pasifik dan membangun ketahanan mereka terhadap perubahan iklim dan tantangan lainnya. Partai Buruh Australia, di bawah pimpinan Albanese, tetap setia pada ideologi sosial demokrat dengan penekanan pada kesejahteraan sosial, ketidaksetaraan, dan hak-hak pekerja. Isu kesejahteraan sosial, termasuk pendidikan dan perawatan kesehatan yang terjangkau, menjadi sorotan utama, bersama dengan keprihatinan mendalam terhadap perubahan iklim dan tekad untuk menjadikan Australia sebagai pemimpin dalam upaya mengurangi emisi karbon.

Secara historis, hubungan bilateral Indonesia dan Australia dimulai sejak Indonesia pertama kali mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Saat itu, Australia merupakan salah satu negara pertama yang mengakui dan mendukung pernyataan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Dukungan ini telah menciptakan hubungan historis yang kuat antara kedua negara, dimana Australia merupakan salah satu negara yang memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.² Meski memiliki landasan sejarah yang kuat, hubungan Indonesia dan Australia tidak selalu berjalan dengan baik. Kedua negara ini telah menghadapi berbagai tantangan dan ketegangan sepanjang sejarah hubungan mereka. Beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan ini antara lain perbedaan pendapat mengenai isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia, perbatasan, hak maritim, dan hak kedaulatan. Salah satu isu yang kerap menimbulkan ketegangan adalah isu HAM, khususnya terkait situasi di Papua Barat. Indonesia menganggap Papua Barat merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak boleh negara manapun yang berhak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Di sisi lain, Australia sering berasumsi bahwa hak asasi manusia di Papua Barat tidak diimplementasikan dengan baik oleh Indonesia. Hal ini tentu saja merupakan salah satu hal yang sering menimbulkan ketegangan dan perselisihan dalam hubungan bilateral keduanya. Masih banyak isu-isu yang dengan cepat memicu ketegangan hubungan bilateral Australia dan Indonesia diantaranya lingkungan hidup, perubahan iklim, pemberian suaka, juga isu pertahanan dan keamanan. Hal ini yang menyebabkan kerja sama bilateral keduanya banyak menemui hambatan, baik dari sisi perbedaan regulasi yang sulit untuk dicapai *resultante*-nya maupun perbedaan tujuan dalam negeri masing-masing yang sangat sulit diintegrasikan. Meskipun terdapat banyak hambatan yang memicu ketegangan, Indonesia dan Australia sama-sama menyadari pentingnya hubungan bilateral keduanya bagi

² Irvan Dwi Rohmawan. Skripsi, Kebijakan Politik Australia : Analisis Terhadap Peranan Australia dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia (1945-1949). Yogyakarta : FISE, 2010, hal. 2 .

terciptanya situasi regional yang kondusif.³ Oleh karena itu, kedua negara terus berupaya memperkuat hubungan melalui dialog, negosiasi, dan kerja sama bilateral yang memiliki banyak persamaan terutama dalam hal kesamaan tujuan, seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Dalam konteks regional dan global, hubungan Indonesia-Australia juga mempunyai implikasi yang lebih luas. Keduanya bekerja sama untuk mengatasi isu-isu penting seperti perubahan iklim, penanggulangan bencana dan pengentasan kemiskinan di kawasan Asia-Pasifik. Kedua negara juga mendukung kerja sama lintas batas untuk mendorong perdagangan yang adil dan berkelanjutan, menjaga stabilitas keamanan di kawasan, lalu ada juga kerja sama di bidang ekonomi, seperti IA-CEPA (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*).

Sangat sulit memang untuk menyatukan hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia ke jenjang yang lebih erat lagi. Terkadang hubungan bilateral yang sangat erat yang berhasil dicapai pada masa salah satu Perdana Menteri Australia yang merupakan pimpinan pemerintah, kemudian menjadi renggang kembali pada saat Pemerintah Australia dipimpin oleh perdana menteri lainnya. Secara sederhana, setiap pergantian Perdana Menteri Australia akan menciptakan dinamika hubungan bilateral antara keduanya.

Hubungan keduanya diawali dengan hubungan yang baik pada era Pemerintah Australia ketika dipimpin oleh Joseph Benedict Chifley. Chifley merupakan Perdana Menteri Australia yang menjabat pada Periode Tahun 1945-1949, yang juga merupakan pimpinan Partai Buruh Australia. Pada masa kepemimpinannya Australia telah berani mengubah permusuhan tradisional Australia terhadap negara-negara Asia dengan memutuskan memihak Indonesia daripada memihak Belanda. Tentu saja bagi Indonesia saat itu, sikap Australia tersebut dianggap sebagai dukungan moral yang sangat berarti. Australia pun

³ Chauvel, Richard, and ChusnulMar'iyah. *Indonesia-Australia: tantangan dan kesempatan dalam hubungan politik bilateral*. Yayasan Obor Indonesia, 2005.

termasuk negara yang mengecam tindakan agresi militer Belanda terhadap Indonesia yang dilakukan pada Juli 1947 dan Desember 1948.⁴

Hubungan yang pada awalnya baik seperti digambarkan sebelumnya kemudian memburuk. Pada era Perdana Menteri Robert Menzies yang dilantik menggantikan Chifley pada 10 Desember 1949. Australia menjadi negara yang "menentang" Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Presiden Soekarno yang mencoba mengambil kembali Irian Barat dan memulai konflik dengan Malaysia. Pada kepemimpinan Menzies yang berasal dari Partai Koalisi Liberal Country, Australia telah mengubah pandangannya terhadap Indonesia, yang sebelumnya mendukung kemudian berubah menjadi salah satu negara yang menentang kedaulatan Indonesia atas Irian Barat dan tampaknya mendukung keberadaan Belanda di sana.

Hubungan antara Australia dengan Indonesia kembali membaik pada sekitar Tahun 1967, yaitu tepatnya pasca kejatuhan kepemimpinan Presiden Soekarno di Indonesia. Kepemimpinan Pemerintah Indonesia yang baru, yang dipimpin oleh Soeharto yang menganut kebijakan luar negeri yang bebas aktif, ternyata menjadi salah satu faktor yang kondusif bagi pesatnya hubungan antara Australia dengan Indonesia ke arah yang lebih baik. Pemerintah Australia yang saat itu dipimpin oleh Harold Holt, yang kemudian menghilang di Pantai Cheviot, Victoria pada sekitar Desember 1967, yang kemudian digantikan oleh Sir John McEwen yang berasal dari Partai Nasionalis Australia, turut berperan aktif atas terbentuknya suatu konsorsium lembaga keuangan internasional yaitu *Intern Governmental Group on Indonesia* (IGGI), yang bertujuan untuk men-*support* pembangunan di Indonesia.

Hubungan keduanya mulai memburuk kembali ketika Indonesia pada Tanggal 7 Desember 1975 melakukan operasi militer yang dikenal dengan

⁴ Cismifah, Sihatul. Skripsi. "DINAMIKA HUBUNGAN AUSTRALIA DENGAN INDONESIA DALAM BIDANG POLITIK TAHUN 1945-1966." Repository Universitas Jember, 2017.

Operasi Seroja ke Timor Timur.⁵ Anti-kolonialisme dan anti-komunisme dijadikan dasar dilakukannya Intervensi tersebut oleh Indonesia, dan dengan tujuan untuk menggulingkan rezim Fretilin yang muncul sejak tahun 1974. Australia yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Malcolm Frase yang berasal dari Partai Koalisi Liberal-Nasional sangat mengecam intervensi Indonesia ke Timor timur, dan menyatakan bahwa dasar yang dikemukakan oleh Indonesia untuk intervensi tersebut dinyatakan hanya sebagai dalih saja. Pemerintah Australia menjadi lebih mengecam tindakan operasi militer tersebut, setelah diketahui terdapat lima wartawan Australia yang tewas di medan pertempuran Balibo, Timor Timur.

Kebekuan hubungan kedua negara kembali membaik setelah Partai Buruh berkuasa lagi pada tahun 1983. Kemenangan Bob Hawke atas Malcolm Fraser kembali membawa angin segar bagi hubungan antara Australia dengan Indonesia. Secara perlahan, Australia dapat memperbaiki hubungannya dengan Indonesia. Salah satunya ditandai dengan kunjungan para menteri Australia dari Tahun 1983 sampai dengan Tahun 1986. Puncak dari kehangatan hubungan kedua negara terjadi pada 22 Agustus 1985, yaitu ketika PM Bob Hawke menyatakan mengakui secara *de jure* integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia.⁶

Hubungan Australia-Indonesia mengalami keretakan lagi setelah jurnalis Australia, David Jenkins, menulis artikel kontroversial mengenai bisnis keluarga Presiden Soeharto pada 10 April 1986. Artikel tersebut memicu kemarahan Indonesia, yang secara langsung merespon dengan membatalkan kunjungan B.J. Habibie dan juga membatalkan kerjasama militer dengan Australia. Ketegangan baru mereda pada tahun 1988 setelah pernyataan Menteri Pertahanan Australia, Kim Beazly, yang mendesak perbaikan hubungan. Meskipun peristiwa Santa

⁵ Ribawati, E. Dinamika Hubungan Indonesia-Australia: Studi Kasus Kepentingan Australia dalam Konflik Timor Timur. *HEURISTIK: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(1), 35-40.

⁶ Wijayanti, Y. (2019). Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Tahun 1945-1995. *Jurnal Artefak*, 3(1), 51-58.

Cruz di Dili pada 11 November 1991 memicu protes keras dari Australia, hubungan kedua negara membaik hingga Juni 1995.⁷

Hubungan Australia-Indonesia memasuki fase positif dengan kerjasama ekonomi, terutama setelah penandatanganan Perjanjian Celah Timor pada Tahun 1989 yang mengatur eksplorasi minyak di Laut Timor.⁸ Pada tahun 1992, Forum Menteri Indonesia-Australia dibentuk untuk meningkatkan kerjasama di bidang pangan, pertanian, perdagangan, industri, dan investasi. Di bidang pertahanan, hubungan keduanya semakin substansial dengan terealisasinya latihan militer gabungan sejak tahun 1990. Keduanya juga bekerja sama dalam bidang budaya melalui pembentukan Australia-Indonesia Institute pada Tahun 1989, serta penyediaan beasiswa melalui AUSAID (*Australian Agency For International Development*) untuk meningkatkan pendidikan dan hubungan antar warga negara.

Di tengah hubungan Australia-Indonesia yang cukup erat, kemudian renggang kembali pada sekitar Tahun 1995- an. Terdapat tiga peristiwa penting yang mengganggu hubungan kedua negara tersebut saat itu. Pertama, penolakan Australia terhadap Letjen (purn) H.B.L. Mantiri sebagai calon duta besar yang diajukan oleh Indonesia untuk Australia pada tanggal 6 Juli 1995. Kedua, pemberian visa oleh Australia kepada 18 imigran asal Timor Timur yang melarikan diri pada tanggal 24 Mei 1995. Ketiga, insiden pembakaran bendera merah putih oleh demonstran Timor Timur anti-integrasi di beberapa kota Australia, seperti Sydney, Brisbane, Melbourne, dan Adelaide.⁹ Reaksi yang muncul atas peristiwa tersebut kemudian menimbulkan respon dari pihak Pemerintah Indonesia yang ber-eskalasi. Gabungan Pengusaha Eksporir Nasional Seluruh Indonesia melakukan demonstrasi, mengirim nota protes, dan mengancam boikot sebagai respons terhadap suatu kejadian atau kebijakan yang tidak disukai. Pemerintah Indonesia juga mengosongkan pos Duta Besar

⁷ Ibid.

⁸ Hasanah, M. A. (2019). *Perjanjian Celah Timor: Potret Kegagalan Diplomasi Pemerintah Indonesia, 1972-1999* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

⁹ Sinaga, C. M. (2014). *Dinamika Hubungan Australia-Indonesia dalam Bidang Politik (2010-2015)*. *Skripsi, Universitas Hasanuddin*, 1-5.

Indonesia untuk Australia yang sebelumnya dipegang oleh Sabam Siagian selama hampir delapan bulan. Pada 6 Desember 1995, Wirjono Sastrohandoyo ditetapkan sebagai duta besar penggantinya.¹⁰

Dari perjalanan hubungan antara Australia dan Indonesia, tergambar bahwa hubungan yang terjalin sangat dinamis dan terkesan sangat fluktuatif. Ternyata kedekatan geografis antar keduanya yang berbatasan langsung tidak dapat menjamin terciptanya suatu keharmonisan yang berlangsung secara terus menerus, bahkan cenderung malah mengalami pasang surut. Pasang surut hubungan antara Australia dan Indonesia diindikasikan dipengaruhi beberapa hal pokok, yaitu perbedaan dalam hal pelaksanaan demokrasi dan budaya politik, kebijakan politik luar negeri, adanya persepsi ancaman, dan kurang kokohnya hubungan ekonomi kedua negara.

Berdasarkan pendekatan historis dapat tergambar bahwa pergantian kepemimpinan Pemerintah Australia ternyata memberikan pengaruh terhadap hubungan bilateral antara Australia dengan Indonesia. Meskipun, terkadang memburuknya hubungan keduanya diawali dengan persepsi publik Australia terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia, walaupun sebenarnya penanganan cara penyelesaiannya bergantung pada pemimpinnya dalam hal ini perdana menteri. Perbedaan gaya kepemimpinan, dan pandangan politik Perdana Menteri Australia diduga kuat menjadi sumber atas penanganan penyelesaian konflik hubungan antara Australia dan Indonesia, dimana pandangan politik tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang Partai Politik Perdana Menteri Australia yang menjabat. Pergantian kepemimpinan Pemerintah Australia menjadi faktor yang sangat krusial dalam mengubah arah kebijakan luar negeri dan prioritas nasional. Perbedaan gaya kepemimpinan, visi politik, serta pendekatan terhadap hubungan bilateral diperkirakan akan sangat mempengaruhi dinamika hubungan bilateral Australia dengan Indonesia.

¹⁰ Nurdin, M. F. (2011). Kedaulatan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Kesejahteraan Sosial. *Puslitbang KPK LPPM Unpad, Bandung*. Hal. 78.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh pergantian kepemimpinan pemerintahan Australia dari era Perdana Menteri Scott Morrison hingga Anthony Albanese terhadap dinamika hubungan bilateral dengan Indonesia. Dalam konteks ini, pergantian kepemimpinan di suatu negara dapat berdampak signifikan terhadap arah dan intensitas hubungan diplomasi dan kerja sama antar negara mitra. Disamping itu, pergantian kepemimpinan ini akan mengeksplorasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perubahan hubungan bilateral kedua negara. Faktor-faktor seperti orientasi politik masing-masing pemimpin, pandangan tentang kerja sama regional, dinamika geopolitik di kawasan Asia-Pasifik, serta interaksi dengan kepentingan global akan dieksplorasi untuk dianalisis sebagai suatu faktor yang dapat mempengaruhi hubungan bilateral dengan Indonesia.

Dinamika hubungan Australia-Indonesia yang fluktuatif telah menciptakan suatu kondisi realisasi yang memiliki sensitivitas tinggi. Meskipun terdapat juga hal lainnya, yaitu tingginya sentimen publik terhadap hubungan antara Australia dan Indonesia juga kerjasama ekonomi yang belum optimal yang ditandai dengan tingkat investasi Australia yang rendah di Indonesia. Australia cenderung lebih memilih mitra perdagangan dengan Negara ASEAN yang lain.. Selain itu, kerjasama pertahanan dan keamanan antara kedua negara juga belum sepenuhnya terintegrasi. Gaya dan sikap kepemimpinan Perdana Menteri Australia memainkan peran kunci dalam penetapan kebijakan luar negeri terhadap Indonesia dan dalam menanggapi potensi ketegangan dalam hubungan bilateral. Oleh karena itu, untuk memperkuat hubungan ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, mengintegrasikan kerjasama pertahanan, dan memperhatikan gaya kepemimpinan dalam rangka mencapai stabilitas dan keberlanjutan.

Sejarah menunjukkan bahwa hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia telah mengalami pasang surut dengan intensitas yang cukup tinggi sejak

masa kemerdekaan Indonesia. Dalam suatu masa kepemimpinan Perdana Menteri Australia, hubungan keduanya terlihat erat, akan tetapi menunjukkan hubungan yang sebaliknya pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Australia lainnya. Hubungan bilateral yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi ini menyebabkan kerja sama bilateral pun cukup memiliki *barrier* yang sangat tinggi. Hal ini lah yang menyebabkan kerja sama ekonomi bilateral antara Australia dengan Indonesia tidak optimal bila dibandingkan dengan potensi manfaat yang terkandung. Selain itu, hubungan bilateral keduanya yang bersifat sangat dinamis, juga menyebabkan *investment rate* Australia di Indonesia sangat rendah bila dibandingkan dengan *Investment rate* Australia di Negara ASEAN lainnya. Australia merasa lebih nyaman untuk menjalin kerja sama perdagangan dengan Negara ASEAN lainnya. Hubungan bilateral keduanya yang selalu mengalami perubahan, juga menyebabkan kerja sama Pertahanan dan Keamanan menjadi hanya sekedar berkuat pada latihan militer bersama. Uniknya hal itupun secara tiba-tiba dapat dibatalkan jika hubungan kedua Negara menjadi renggang. Padahal, secara geografis, Australia dan Indonesia merupakan Negara yang sangat berpengaruh dalam pertahanan dan keamanan di Asia-Pasifik, yang tentu saja membutuhkan kerja sama pertahanan dan keamanan yang lebih erat dan terintegrasi, guna menciptakan kawasan Asia-Pasifik yang kondusif.

Selain itu, hubungan bilateral keduanya sangat dipengaruhi juga oleh persepsi publik masyarakat Australia terhadap Indonesia. Masyarakat Australia terkesan selalu mengkritisi pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, khususnya di Papua.¹¹ Peningkatan persepsi negatif di Australia terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia, khususnya di Papua, dapat disebabkan oleh adanya warga Papua yang mencari suaka di Australia, dan seruan kemerdekaan Papua yang mendapat dukungan di sana. Demonstrasi Gerakan Papua Merdeka di kota-kota besar Australia juga turut mempengaruhi pandangan masyarakat. Sebagai contoh, pemberian penghargaan oleh *Australian Council for International Development* kepada Veronica Koman, yang dianggap mereka

¹¹ Op.Cit.

sebagai simbol keberanian dalam membela Hak Asasi Masyarakat Papua, sangat kontradiktif dengan Keputusan Pemerintah Indonesia melalui POLRI yang telah menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka atas salah satu tindak pidana kerusuhan di Indonesia. Meskipun, tidak berapa lama kemudian, Pemerintah Australia menyatakan bahwa pemberian penghargaan tersebut bukan merupakan sikap resmi dari Pemerintah Australia.

Kerentanan yang terjadi dalam hubungan Australia dan Indonesia seharusnya secara prinsip dapat ditekan oleh pemerintah Australia sendiri, dalam hal ini adalah Perdana Menteri selaku Kepala Pemerintahan Australia. Bagaimana seorang Perdana Menteri mengambil sikap atas kerenggangan yang terjadi, dan bagaimana pula seorang Perdana Menteri dapat mengelola isu-isu yang dapat menyebabkan hubungan bilateral dengan Indonesia tidak berkembang. Secara historis dapat digambarkan tentang perbedaan sikap perdana menteri Australia dalam mensikapi isu-isu terkait Indonesia yang menyebabkan hubungan bilateral keduanya mengalami krisis. Hal ini dibuktikan, Pemerintah Australia merupakan salah satu Negara yang mendukung deklarasi kemerdekaan Indonesia pada Tahun 1945, akan tetapi pergantian perdana Menteri Australia menyebabkan perilaku dan sikap yang berbeda terhadap Indonesia dan bahkan berbalik menentang eksistensi Indonesia. Perubahan drastis dalam hubungan bilateral Australia dan Indonesia secara intens juga terjadi pada setiap perubahan kepemimpinan Pemerintah Australia dalam hal ini Perdana Menteri. Selalu terjadi dinamika pada saat Pemerintah Australia dipimpin oleh Perdana Menteri yang berbeda.

Terdapat perbedaan sikap Perdana Menteri Australia terhadap jalinan hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia. Pergantian Perdana Menteri Australia sejak Tahun 1945 sampai dengan saat ini yang telah mencapai 18 (delapan belas) kali pergantian, dan masing-masing memiliki perbedaan dalam mensikapi isu-isu terkait Indonesia. Untuk itu, penulis sangat tertarik untuk menggali perbedaan sikap perdana menteri tersebut. Dan mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan sikap tersebut., yang difokuskan kepada analisa *Personality Dan Leadership Style*, dan *Political History Dan Personal*

Experiences Perdana Menteri Australia yang menjabat, juga partai politik tempat bernaungnya Perdana Menteri yang menjabat, untuk mengetahui apakah patron partai politik mempengaruhi tindakannya tersebut.

Adanya keterbatasan yang dimiliki, sehingga penulis membuat batasan waktu penelitian yaitu pada masa kepemimpinan Perdana Menteri **SCOTT MORRISON** dan masa kepemimpinan Perdana Menteri **ANTHONY ALBANESE**. Batasan penelitian ini ditetapkan dengan salah satu dasar bahwa telah terdapat beberapa artikel yang telah membahas hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia pada era Perdana Menteri-Perdana Menteri sebelumnya.

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

Apakah pergantian kepemimpinan Pemerintah Australia mempengaruhi dinamika hubungan bilateral dengan Indonesia pada era PM Scott Morrison dan Anthony Albanese?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisa pengaruh pergantian kepemimpinan pemerintah Australia terhadap hubungan bilateral Australia-Indonesia pada era PM Scott Morrison dan PM Anthony Albanese.
2. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan dan dinamika hubungan bilateral antara Australia dengan Indonesia.

1.5. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Memberikan wawasan yang lebih baik tentang pengaruh pergantian kepemimpinan Pemerintah Australia terhadap dinamika hubungan bilateral dengan Indonesia, dengan memahami perubahan kebijakan dan

pendekatan hubungan bilateral di bawah kepemimpinan perdana menteri yang berbeda.

2. Membantu pembuat kebijakan dalam merencanakan strategi dan mengelola hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia dengan menganalisis pola kerjasama dan potensi konflik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat kerjasama bilateral yang saling menguntungkan dan mengatasi potensi ketegangan atau perbedaan kepentingan antara kedua negara.
3. Kontribusi terhadap literatur dan kajian ilmu hubungan internasional, dengan memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang pengaruh pergantian kepemimpinan terhadap hubungan bilateral. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori dan pengetahuan dalam bidang hubungan internasional. Dengan demikian, hal ini dapat memicu penelitian lebih lanjut dan membuka jalan bagi pemikiran dan perspektif baru dalam kajian hubungan internasional.
4. Memperkuat pemahaman publik tentang hubungan antara Australia dan Indonesia sebagai negara mitra, dengan menganalisa dinamika hubungan bilateral dalam konteks pergantian kepemimpinan. Penelitian diharapkan ini dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik antara Australia dan Indonesia.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab yang meliputi:

BAB I

Berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Berisi kajian pustaka mengenai penelitian terdahulu tentang hubungan antara Australia dan Indonesia, kerangka teoritis terkait penggunaan teori idiosinkratis pada penelitian, serta kerangka pikir berupa diagram alur yang mendeskripsikan pola pikir dalam penyelesaian masalah.

BAB III

Berisi Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian yang menjelaskan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian, Penentuan Informan untuk mendukung objektivitas penelitian, penggunaan literature/studi pustaka dan wawancara dalam teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data, penentuan lokasi dan jadwal penelitian, serta penetapan aspek dimensi dan parameter dalam penelitian.

BAB IV

Berisi Pembahasan dan Analisis mulai dari kebijakan Luar Negeri pada era Scott Morrison dan Dinamika Hubungan Bilateral Aus-RI, yang kemudian dilanjut dengan kebijakan Luar Negeri era Anthony Albanese, dan Dinamika Hubungan Bilateral Aus-RI, dan Analisa Ideosinkratiknya.

BAB V

Berisi penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian atau Skripsi yang berjudul Pengaruh Pergantian Kepemimpinan Pemerintah Australia Terhadap Dinamika Hubungan Bilateral Dengan Indonesia Pada Era Perdana Menteri Scott Morrison Dengan Anthony Albanese.